

**PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD**

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Malang, Provinsi Jawa Timur		
Tahun Penilaian	: 2023		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2018 - 2023		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
OPD yang Dinilai	: Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
Sumber Data	: Renstra, Renja, Laporan Sakip, DPA		
Tujuan Strategis	Terwujudnya kualitas tenaga kerja yang berdaya saing, penanaman modal dan layanan perizinan dan non perizinan yang akuntabel		
Sasaran Strategis	1 Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang kompeten dan nilai penanaman modal		
	2 Meningkatkan penempatan kerja dan hubungan industrial yang kondusif		
	3 Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik		
	4 Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan		
	5 Meningkatkan kinerja pelayanan perangkat daerah		
IKU Renstra OPD	IKU		2023
	1 Tingkat partisipasi angkatan kerja		72
	2 Predikat WBK		75
	3 Rasio daya serap tenaga kerja		73
	4 persentase peningkatan nilai investasi daerah		0,04
	5 rasio penduduk yang bekerja		94,4%
	6 Indeks layanan SPBE pada aspek pelayanan publik		0,045
	7 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan		89
	8 Nilai SAKIP		81,83
Program	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persentase dok perencanaan keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%
	2. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang pelatihan berbasis kompetensi (1%) Persentase peserta pelatihan ketrampilan kerja	1% 70%
	3. Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan	78%
	4. Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	11.30%
	5. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Realisasi Penanaman Modal	80%
	6. Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah minat investor	60%
	7. Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase penerbitan ijin dan non ijin PU	90%
		persentase Penerbitan ijin dan non ijin ekopar sosbud	90%
		Persentase realisasi target retribusi IMB	100%
	8. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase ketaatan pelaku usaha wajib LKPM	80%
	9. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase sistem informasi yang dapat diakses masyarakat	100%
Kegiatan	Kegiatan di TA 2023		

Menyetujui,

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**ARIF TRI SASTYAWAN, S.STP., M.Si**

Pembina Tk. I

19790709 199810 1 001

**PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD**

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Malang, Provinsi Jawa Timur
Tahun Penilaian	: 2023
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2018 - 2023
Urusan Pemerintahan	: Urusan Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
OPD yang Dinilai	: Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sumber Data	: Renstra, Renja, Laporan Sakip, DPA
Tujuan Strategis	Terwujudnya kualitas tenaga kerja yang berdaya saing, penanaman modal dan layanan perizinan dan non perizinan yang akuntabel
Program DTKPMPTSP dan Kegiatan Utama 2023	<b>1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota</b>
	a Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	b Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	c Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	d Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	e Administrasi Umum Perangkat daerah
	f Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	g Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	h Pemeliharaan Barang Mlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	<b>2. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja</b>
	a Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
	b Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
	<b>3. Program Penempatan Tenaga Kerja</b>
	a Pelayanan antar kerja di daerah kota
	<b>4. Program Hubungan Industrial</b>
	a Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kota
	<b>5. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>
	a Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kota
	<b>6. Program Promosi Penanaman Modal</b>
	a Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kota
	<b>7. Program Pelayanan Penanaman Modal</b>
	a Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kota
	<b>8. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>
	a Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kota
	<b>9. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>
	a Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kota
Keluaran/Hasil Kegiatan	1.a Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan
	1.b Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu
	1.c Persentase barang milik daerah yang terinventarisir
	1.d Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian
	1.e Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi
	1.f Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD
	1.g Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti
	1.h Persentase barang milik daerah yang terpelihara
	2.a Jumlah pengangguran yang dilatih
	2.b Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina
	3.a Jumlah bursa kerja khusus wilayah Kota
	4.a Persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama
	5.a Jumlah dokumen penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal
	6.a Jumlah kegiatan pameran penanaman modal
	7.a Jumlah layanan perizinan dan non perizinan sesuai standar

8.a	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	
9.a	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang tersedia	

Menyetujui,  
Kepala Dinas Tenaga Kerja,  
Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu

**ARIF TRISASTYAWAN S.STP.,M.Si**  
Pembina TK. I  
19790709 199810 1 001

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA			
Nama Pemda	: Pemerintah Kota Malang, Provinsi Jawa Timur		
Tahun Penilaian	: 2023		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2018 - 2023		
Sumber Data	RPJMD		
Visi	"Kota Malang Bermartabat"		
Misi Strategis RPJMD	Misi 1. Menjamin Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya Bagi Semua Warga		
	Misi 2. Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan		
	Misi 3. Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran Berasaskan Keberagaman dan Keberpihakan terhadap Masyarakat Rentan dan Gender		
	Misi 4. Memastikan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel		
Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda	Misi ke 3 : Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran berasaskan Keberagaman dan Keberpihakan terhadap Masyarakat Rentan dan Gender		
Tujuan Strategis RPJMD	1. Terwujudnya Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	
	2. Terwujudnya Produktifitas dan Daya Saing Daerah yang Merata dan Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi (GINI RATIO)	
	3. Terwujudnya Kesejahteraan dan Kerukunan Sosial yang Berpihak Masyarakat Rentan dan Gender	Angka Kemiskinan (Indeks Modal Sosial)	
	4. Terwujudnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel	Indeks Refomasi Birokrasi (RB)	
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda	1. Terwujudnya produktifitas dan daya saing daerah yang merata dan berkelanjutan 2. Terwujudnya kesejahteraan dan kerukunan sosial yang berpihak masyarakat rentan dan gender		
Sasaran RPJMD	I-1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	
	I-2	Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sapsras kota secara terpadu	
	II-1	Meningkatnya kualitas perlindungan sosial; dan	
	II-2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan	
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif Meningkatnya Kualitas Perlindungan Sosial		
IKU Sasaran RPJMD	1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase penurunan PMKS
Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda		Tingkat Pengangguran Terbuka	
Prioritas pembangunan dan program unggulan		Program Pembangunan Daerah : Peningkatan kualitas perlindungan sosial	
		1. Program Penempatan Tenaga Kerja;	
		2. Program Hubungan Industrial;	
		3. Program Rehabilitasi Sosial;	
		4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;	
		5. Program Pemberdayaan Sosial;	
		6. Program Penanganan Bencana.	
Inteverensi Walikota dan wakil		1. Membangun Sarana Prasarana Sosial yang ramah terhadap penyandang difabel;	
		2. Pembangunan panti jompo terpadu berkonsep villa lansia di wilayah malang timur;	

		3. Membangun sistem distribusi bantuan social darurat;			
		4. Membangun sistem informasi penghubung warga yang ingin membantu anak kurang mampu dan berkebutuhan khusus;			
		5. Membina dan Memberdayakan PMKS untuk lebih produktif.			
<b>Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Urusan Pemerintahan di Bidang Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
Nama Dinas Terkait		Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko		Uraian	Indikator Kinerja Utama	Fomulasi Perhitungan/ penjelasan	Target
Tujuan		Terwujudnya kualitas tenaga kerja yang berdaya saing, penanaman modal dan layanan perizinan dan non perizinan yang akuntabel	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Jml Angkatan Kerja dibagi jumlah tenaga kerja dikali seratus persen	72
			Predikat WBK	Penetapan WBK	75
Sasaran		1. Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang kompeten dan nilai penanaman modal	Rasio daya serap tenaga kerja	jml oejerha/buruh di perush swasta/PMA/PMDN dibagi juml perush	73
			persentase peningkatan nilai investasi daerah	Nilai investasi thn n dikurangi nilai invest tahun N-1 dikali 100%	4.00%
		2. Meningkatnya penempatan kerja dan hubungan industrial yang kondusif	rasio penduduk yang bekerja	jml penddk bekerja dibagi jml angk kerja dikali 100%	94.4%%
		3. Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks layanan SPBE pada aspek pelayanan publik	Nilai indeks SPBE	4.50%
		4. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan	Nilai SKM	89
		5. Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	Nilai ev SAKIP	81.83
<b>Program Strategis</b>					
<b>Program</b>		1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota			
Bidang Urusan Tenaga Kerja		2. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja			
		3. Program Penempatan Tenaga Kerja			
		4. Program Hubungan Industrial			
Bid Urusan Penanaman Modal		5. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal			
		6. Program Promosi Penanaman Modal			
		7. Program Pelayanan Penanaman Modal			
		8. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			
		9. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal			
Kegiatan					